

# PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPERKENALKAN BAKAL CALON MENJELANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN ACEH JAYA

**Aminah**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar  
Email: Aminahaneukpanga@gmail.com/aminah@utu.ac.id

## ***Abstract***

*This research aims to explain about to examine about the role of social media in introducing billed candidate ahead of the legislative election 2019 in the district of Aceh Jaya and the advantages and disadvantages in the use of social media by every political actors of Aceh Jaya. The data that is required in writing is obtained through library research and field. Library research done with how to read text books, legislation, and other reading material related to this research. While field research done by interviewing informants. The results of the study showed that social media has an important role in introducing the embryo candidate for legislative members. Through social media particularly Facebook, the embryo candidate for legislative members can promote itself faster, right and would not eat a large amount of money in campaigning. In addition, social media users there is no limits in campaigning. Anytime and anywhere during can still be reachable by internet network, so everyone can take advantage of it. But despite this, social media also has a shortage of displays the existence of the party who is not responsible to take photos to be made as a mock materials or arranged by these accounts crowd and distributed so that they can execute the popularity and elektabilitas from billed candidate for legislative members.*

***Key Words: The Role, Media, Political Communication and Legislative Election***

## **1. PENDAHULUAN**

Internet merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi bagi kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat, internet telah masuk dan merambah kedalam kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya media sosial (*social media*). Sebagaimana diketahui bahwa media sosial merupakan salah satu media online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti Facebook, Twitter, Line dan beberapa aplikasi yang serupa. Kehadiran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu mengubah cara berkomunikasi manusia, baik secara individu maupun kelompok di ranah sosial, budaya, ekonomi dan bahkan kehadiran media sosial juga ikut mempengaruhi bidang politik. Hal ini seperti Studi di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa media sosial merupakan salah satu alat kampanye yang efektif (Chavez, 2012).

Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun, tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif (kelebihan) dan dampak negatif (kekurangan).

Kehadiran media sosial mampu membuat informasi politik tidak hanya semakin masif akan tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif. Sehingga tidak sedikit para atau aktor-aktor politik di sejumlah Negara mulai memanfaatkan media sosial sebagai proses kampanye politik. Selain itu, media sosial juga mampu untuk menjangkau para pemilih pemula serta tidak memerlukan anggaran yang besar untuk proses kampanye. Di satu sisi, media sosial memang menawarkan peluang bagi para aktor politik untuk bisa menjangkau para pemilih dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekaligus membentuk perbincangan yang lebih “akrab” dengan para pemilih. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat membuat aktor politik menjadi bahan tertawaan atau bahkan menjadi cacu maki dari masyarakat atau Para pengguna media sosial lainnya. Peningkatan jumlah pengguna internet merupakan potensi tersendiri bagi para aktor politik dalam melakukan komunikasi politik dan dalam meraih dukungan. Pileg merupakan ajang pemilihan umum yang selalu dinantikan oleh masyarakat di setiap daerah sebagai cara masyarakat dalam berdemokrasi. Melalui adanya partisipasi masyarakat, diharapkan Pileg ini dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil.

Menjelang Pileg di Kabupaten Aceh Jaya, setiap para bakal calon anggota legislatif mulai menyusun strategi ataupun cara agar dapat menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari masyarakat kabupaten Aceh Jaya per daerah pemilihan (dapil) nya. Dapil di kabupaten Aceh Jaya dibagi menjadi empat dapil yaitu Dapil 1 meliputi wilayah Kecamatan Krueng Sabee dan Panga, Dapil 2 wilayah Kecamatan Teunom dan Pasie Raya, Dapil 3 Wilayah Kecamatan Jaya dan Indra Jayasedangkan Dapil 4 meliputi wilayah Sampoiniet, Darul Hikmah dan Setia Bakti (KIP Aceh Jaya, 2018). Dapil 1 memperebutkan 6 kursi untuk pemilihan umum di tahun 2019, dapil 2 mendapatkan kursi 4 dan dapil 3 dan 4 memperebutkan 5 kursi masing-masing dapil. Penentuan jumlah kursi ini diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk.

Berbagai macam cara mulai dilakukan oleh setiap Para bakal calon anggota legislatif baik dilakukan oleh partai politik maupun dilakukan oleh Para bakal calon itu sendiri. Salah satu cara yang ditempuh oleh para bakal calon anggota legislatif yaitu dengan memanfaatkan media sosial terutama *Facebook* yang digunakan sehari-hari oleh setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran media sosial dalam memperkenalkan bakal calon menjelang pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya serta kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media sosial oleh setiap aktor politik Kabupaten Aceh Jaya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori-teori yang relevan dari berbagai literatur khususnya tentang Peran, Komunikasi Politik.

### **Pengertian Peran**

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237). Teori peran yaitu teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran dikenal sebagai teori yang berawal dari sosiologi dan masih tetap digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka lahirlah teori-teori peran. Biddle dan Thomas (1966) menjelaskan bahwa teori peran dibagi menjadi empat golongan yaitu hal-hal yang menyangkut dengan:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Berikut adalah berapa dimensi peran, diantaranya yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengikut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi agar mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran ini didayagunakan sebagai suatu cara agar dapat mengurangi atau meredakan konflik melalui 8 usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pandangan sehingga dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta dapat mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan didalam kehidupan masyarakat;
5. Peran sebagai terapi. Menurut pendapat ini, peran yang dikukan yaitu sebagai upaya agar masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoeopetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

### **Pengertian Komunikasi Politik**

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Dan Nimmo, 2005: 6). Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Dan Nimmo, 2005: 8). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan permuasan keinginan (*statement of intent*) belaka (Ardial, 2010: 23-24).

*Politics*, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, dalam Bahasa Yunani kata politik juga dikenal beberapa istilah seperti

*politics* (menyangkut warga negara), *politieis* (seorang warga negara), *polis* (negara kota), dan *politeia* (kewargaan). Pengertian seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini selaras dengan pemikiran Smith yang menyebutkan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik (Nie dan Verb, 975:486).

Menurut Ramlan Surbakti, (2010:152), Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Komunikasi politik tidak hanya mencakup pada penampilan pandangan serta harapan para anggota masyarakat, akan tetapi juga merupakan sarana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa yang diteruskan kepada anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota masyarakat terhadap pandangan dan janji serta saran-saran untuk para penguasa. Komunikasi politik memainkan peranan yang sangat penting di dalam sistem politik: komunikasi politik menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian penentuan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).

Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik bukanlah hal yang baru. komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi atau hubungan antara “yang memerintah” dengan orang “yang diperintah”. (Romli: 2014, hal:7). Adapun prinsip-prinsip komunikasi politik adalah sebagai berikut

1. Konsistensi. Dalam melakukan komunikasi politik, informasi yang disampaikan harus konsisten dengan substansi platform partai dan konsisten terhadap paradigma partai dan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Replikasi. Dalam melakukan komunikasi politik, informasi harus disampaikan berulang kali, sehingga konstituen dan publik paham betul dengan konten/isi platform partai dan apa yang sedang diperjuangkan oleh partai.
3. Evidence. Dalam komunikasi politik informasi yang disampaikan oleh partai harus ada dan dapat dibuktikan kebenarannya dan eksistensinya.

### **Unsur Komunikasi Politik**

Cangara (2009:37), dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

1. Komunikator politik Semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah.
2. Pesan Politik Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik itu tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik misal pidato politik, UU, dll.
3. Saluran atau Media Politik Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik.
4. Penerima Pesan Politik Semua lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik. Misalnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum.
5. Efek atau Pengaruh Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan ke lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari berbagai referensi yang mendukung terhadap kasus yang diangkat. Sedangkan ke lapangan dengan observasi serta melihat, memantau informasi terkait Sedangkan ke lapangan dengan observasi serta melihat dan memantau melalui akun media sosial "Facebook" pribadi penulis terkait peran media sosial dalam memperkenalkan bakal calon menjelang pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya serta kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media sosial oleh setiap aktor politik Kabupaten Aceh Jaya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Peran Media Sosial Dalam Memperkenalkan Bakal Calon Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya**

Pada saat ini, media sosial telah terbukti lebih efektif dalam komunikasi sosial dan komunikasi politik. Efektivitas pesan singkat melalui telepon seluler (sms), Twitter, Facebook dan Blog memang luar biasa. Peran strategis media sosial tersebut dalam komunikasi politik, telah ditunjukkan keberhasilan dan kemampuannya menggalang kekuatan dan dukungan terhadap gerakan prodemokrasi di berbagai Negara seperti Tunisia (2011) dan Mesir (2011). Pada akhir abad ke 20 yang lalu beberapa Negara telah mengalami gerakan politik yang didorong juga oleh media social itu seperti Indonesia (1998), filiphina (2001), dan malaysia (2008). (Anwar, 2011: 171)

Kecepatan orang dalam mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya beragam fenomena yang berkaitan dengan arus informasi. Fenomena ini tidak hanya berlangsung di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Pesatnya perkembangan media sosial juga dipicu oleh keinginan setiap orang untuk merasa harus memiliki media sendiri khususnya *Facebook*. Melalui aplikasi *Facebook*, komunikasi manusia tidak lagi tergantung pada jarak, sehingga perkembangan suatu isu akan lebih mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat yang memiliki akun tersebut. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa penggunaan *Facebook* dalam komunikasi politik, telah dimungkinkan dan sangat urgen serta strategis dalam masyarakat informasi.

Melalui internet, kegiatan komunikasi politik dapat terlaksana dengan menyertakan jutaan orang di seluruh dunia, tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Jika internet digunakan untuk komunikasi politik, maka penerima komunikasi politik yang dapat tercipta oleh internet tersebut sangat khas, yaitu jutaan individu yang terhubung oleh jaringan komputr, yang disebut dengan dunia maya (*cyber space*). Media elektronik baru ini telah membuat perubahan besar dalam masyarakat dengan segala dampak positif dan negatifnya (Severin-Tankard, 2009 :465).

Berdasarkan beberapa dimensi peran seperti yang diungkapkan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), dapat dikategorikan peran media sosial dalam memperkenalkan bakal calon menjelang pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

#### **a. Peran Sebagai Suatu Kebijakan**

Dalam hal ini, peran sebagai suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat atau pemilih dapat menjangkau informasi terkait bakal calon legislatif yang akan maju sebagai anggota DPRK Aceh Jaya. Melalui perkenalan di *Facebook*, pemilih dapat melihat dan mengikuti secara langsung melalui pertemanan yang terjalin diakunnya. Setiap bahasa atau status yang dituliskan oleh sang bakal calon akan mendapat perhatian dan sambutan dari masyarakat. Baik dalam bentuk tanggapan yang positif maupun tanggapan yang negatif.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MZ, berikut adalah hasil wawancaranya:

*“Dari Dinding Facebook itu kita bisa selalu memantau bagaimana perkembangan politik yang dijalankan. Terutama tentang sosok orang atau anggota yang mau maju sebagai anggota DPRK. Sering kali mereka mencoba untuk menarik perhatian masyarakat dengan meng-update berbagai bentuk fenomena yang terjadi disekitarnya. Banyak yang mencoba mencari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh DPRK yang sudah pernah menjabat. Nah ini sering mendapat komentar-komentar dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang komentar positif ada yang komentar negatif. Komentar negatif ini misalkan alah dia cuma pencitraan saja” (Wawancara, 30 Maret 2018).*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh YD, sebagai masyarakat yang selalu aktif dalam dunia media sosial. Berikut adalah kutipan hasil wawancaranya:

*“Dinding Facebook bakal calon anggota legislatif itu selalu dibanjiri oleh komentar-komentar dari masyarakat. Ada pro dan pastinya selalu ada yang kontra juga. Ada yang bilang hanya sebagai pencitraan saja. Namun terkadang apa yang dipostkan tersebut juga benar terjadi di kalangan masyarakat.” (Wawancara, 2 April 2018).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat selalu memantau terhadap perkembangan atau dinding *Facebook* dari sang bakal calon Anggota legislatif. Namun dalam perkembangannya, setiap bahasa yang dikeluarkan oleh Para bakal calon pasti mendapatkan berbagai macam penyambutan baik positif maupun negatif dari masyarakat sebagai pemilihnya kedepan.

#### **b. Peran Sebagai Strategi.**

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi agar mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Hal ini seperti yang diharapkan oleh setiap Para bakal calon anggota legislatif yang menggunakan media sosial agar mampu meraih simpati dari Para pengikut akunnya serta mampu menyita perhatian masyarakat khususnya utuk wilayah dapilnya sehingga pada saat pemilihan terjadi masyarakat akan memilih terhadap bakal calon anggota DPRK tersebut.

Melalui akun *Facebooknya*, Para bakal calon anggota legislatif DPRK Aceh Jaya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan perhatian public. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Para bakal calon anggota legislatif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat daerah pemilihannya.

- Mencoba mendengarkan keluhan atau aspirasi masyarakat.
- Bila sudah pernah menjabat sebelumnya, tawarkan kembali kinerja yang pernah berhasil di periode sebelumnya.
- Mendekati masyarakat secara tepat
- Berbaur dengan masyarakat (tidak hanya dilakukan pada saat-saat kampanye/waktu dekat pemilihan)
- Memberikan program-program yang cocok bagi masyarakat melalui dana aspirasi (bagi Para bakal calon anggota legislatif yang sudah menjadi anggota legislatif).
- Menawarkan program-program yang sesuai dengan kondisi masyarakat daerah pemilihannya.

### **c. Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, dalam hal ini dapat terlihat bahwa. Dalam hal ini, *Facebook* merupakan salah satu alat komunikasi bagi para bakal calon anggota legislatif dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang dapat disalurkan tanpa harus memiliki dana dan waktu yang singkat. Dalam unsur komunikasi politik, peran media sosial dalam hal ini *Facebook* masuk sebagai media atau alat penyampaian pesan.

Para bakal calon anggota legislatif yang ingin maju dapat memperkenalkan dirinya melalui media sosial tersebut. untuk mendapatkan dukungan para stakeholdernya dan para pendukungnya dapat menyebarkan atau membagikan terkait suatu isu yang diungkapkan oleh para bakal calon anggota legislatif tersebut. berita ataupun isu yang disebarkan oleh salah satu bakal calon anggota legislatif akan mendapatkan komentar terhadap pro dan kontra dari setiap masing-masing pengguna. Dalam hal ini, bisa saja bakal calon anggota legislatif akan mendapatkan dukungan dari masyarakat karena telah sepemikiran dengan para komentator tersebut ataupun dapat juga menjadi hal yang berbanding terbalik yaitu foto-foto dari para bakal calon anggota legislatif akan dijadikan bahan untuk guyonan atau bahkan menjadi bahan ejekan terhadap sang publik figur tersebut.

### **d. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Peran ini didayagunakan sebagai suatu cara agar dapat mengurangi atau meredam konflik melalui 8 usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pandangan sehingga dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta dapat mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan di dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran ini, *Facebook* juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat. Hal ini dilakukan dengan cara langsung mengkonfirmasi atau memverifikasikan kembali terkait persoala yang sedang dibahas atau yang sedang heboh di media sosial tersebut. dengan demikian, media sosial ini dapat dikategorikan sebagai alat penyelesaian sengketa ataupun meluruskan kesepahaman orang lain terkait suatu isu dan permasalahan.

Meskipun peran media *Facebook* sebagai penyelesaian sengketa tidak begitu terlihat, namun dalam perjalannya, media *Facebook* mampu mengubah pola pikir masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu media yang bisa menyatukan ide dan pikiran orang-orang yang mengikutinya. Hal ini terbukti bahwa, meskipun beberapa orang yang belum saling mengenal, namun mereka dapat bercengkrama atau lebih akrab melalui media sosial.

### **e. Peran Sebagai Terapi.**

Menurut pendapat ini Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), peran yang dikukan yaitu sebagai upaya agar masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Melalui adanya media sosial *Facebook* masyarakat dan Para bakal calon anggota legislatif mampu menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis dari setiap bakal calon. Hal ini sering terjadi pada bakal calon anggota legislatif yang baru maju di periode ini. Kurangnya percaya diri pada saat jumpa langsung dengan masyarakat, Para dapat para bakal calon dapat mencoba untuk lebih percaya diri melalui media *Facebook*.

Media sosial khususnya *Facebook* berbeda dengan media massa pada umumnya, meskipun sasaran yang disentuh jumlahnya besar, namun tidak bersifat "massa". Media massa mendorong terjadinya massifikasi, sebagai ciri masyarakat industri. Sebaliknya media sosial

lebih banyak bersifat individual, sehingga terjadi individualisasi dan demassifikasi, sebagai ciri dari masyarakat informasi (Anwar, 2011: 175). Beberapa tahun yang lalu untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang cukup besar serta butuh tenaga kerja yang banyak, berbeda halnya dengan media sosial. Pengguna media sosial dapat mengakses hanya dengan menggunakan jaringan internet bahkan yang kemampuan aksesnya lambat sekalipun, tanpa dibutuhkan biaya besar, tanpa alat yang mahal dan bahkan bisa dilakukan sendiri tanpa karyawan (Pujho dalam Junaedi, 2011: 33).

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini, informasi dan komunikasi didukung oleh banyaknya pengguna internet yang berdasarkan data-data yang ada, sehingga media sosial digunakan oleh kandidat-kandidat sebagai salah satu sarana komunikasi politik. Melalui internet, kampanye dapat dilakukan pada tiga segmen sekaligus, yaitu massa, antarpribadi, dan organisasi. Sehingga internet cenderung dijadikan sarana kampanye yang dianggap lebih efektif dan efisien oleh setiap para bakal calon para bakal calon. Partai politik, calon legislatif, kini dapat mengandalkan media sebagai sarana untuk mengiklankan profil sehingga membentuk pencitraan melalui media sosial, Karena media sosial dianggap cukup efektif untuk mendongrak popularitas sekaligus meningkatkan perolehan suara dalam setiap Pemilu. Melalui media sosial *Facebook* iklan politik memainkan peranan penting dalam membentuk pencitraan untuk merebut popularitas dan elektabilitas bagi setiap para bakal calon.

Perkembangan media sosial di dunia maya akan semakin berkembang dan terus tumbuh. Kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkannya akan menjadi faktor strategis bagi pelaku politik dalam proses komunikasi dan kampanye politiknya. Perolehan dukungan dan suara pada saat proses pemilihan umum berlangsung adalah target utama dari setiap para bakal calon. Dalam beberapa periode terakhir ini terlihat bahwa para bakal calon yang maju yang paling populer di media sosial, ialah yang mendapat dukungan dan memperoleh suara terbanyak dari khalayak. Inilah dampak positif terbesar dari media sosial bagi proses komunikasi dan kampanye politik.

### **Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaan Media Sosial Oleh Setiap Aktor Politik Kabupaten Aceh Jaya**

Media sosial khususnya *Facebook* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan serta pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan sosial media. Diantaranya dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **a. Kelebihan**

Media sosial khususnya *Facebook* mampu memberikan efek positif bagi para pelaku politik melalui terjalannya komunikasi politik yang bersifat dua arah serta *intens* dengan para pendukungnya. Hal yang utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu harus dikenal oleh masyarakat atau pemilihnya. Pepatah yang mengungkapkan “Tak kenal maka tak sayang”. Secara umum, para bakal calon anggota legislatif harus mengerti tentang peta geografis dan keadaan di wilayah dapilnya dimana tempat dia akan ikut berkompetisi. Selain sering bercengkrama dengan masyarakat di dunia nyata, para bakal calon anggota legislatif juga perlu memperkenalkan dirinya di media sosial khususnya *Facebook*. Hal ini dilakukan agar masyarakat terutama bagi para pemilih pemula yang belum mengetahui perjalanan karir ataupun jejak sang caleg tersebut.

Kelebihan lain penggunaan media sosial *Facebook* juga dapat meningkatkan angka popularitas dari kurang dikenal menjadi sangat dikenal. Tujuan meningkatkan popularitas adalah sebagai upaya meningkatkan peluang keterpilihan (elektabilitas setiap para bakal calon anggota legislatif yang aktif menggunakan media sosial *Facebook*). Para bakal calon anggota legislatif yang populer akan lebih berpeluang untuk dipilih jika dibanding dengan para bakal calon anggota legislatif yang kurang dikenal. Keterkenalan adalah awal mula dari upaya untuk menang dan terpilih bagi seorang bakal calon anggota legislatif. Ada berbagai macam cara yang

dapat ditempuh untuk meningkatkan angka popularitas. Intinya adalah berkenalan dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat pemilih di wilayah dapil.

Aktif pada media sosial *Facebook* adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan popularitas ini. Mengaktifkan *account facebook* secara serius dan mengayomi masyarakat di wilayah dapilnya, berpenampilan baik dan menjaga kesopanan kehadirannya pada setiap aktivitasnya merupakan cara paling efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu, para bakal calon anggota legislatif juga perlu mempelajari tentang teknik marketing pada bidang media sosial *Facebook* ini secara lebih serius karena pembangunan karakter sebagai para bakal calon anggota legislatif ada pada sikap atau respon yang di tampilkan oleh setiap para bakal calon anggota legislatif. Membangun kepribadian yang berkarakter khusus merupakan bagian dari upaya yang akan berdampak kepada angka popularitas.

Popularitas juga dapat diartikan sebagai para bakal calon anggota legislatif dikenal oleh masyarakat pemilih pada dapil dimana para bakal calon anggota legislatif tersebut maju sebagai calegnya. Membangun karakter pribadi dari para bakal calon anggota legislatif sebagai seorang caleg berkelas tinggi yang merakyat, mengayomi, ramah dalam tegur sapa, cerdas, mampu, berkemauan yang kuat, serta memiliki ahlak yang terpuji sangat penting untuk dilihat oleh para pemilih. Jangan sampai para bakal calon anggota legislatif dikenal sebagai caleg yang lemah, untung-untungan, malas belajar, sempit pemahaman, dan karakter negatif lainnya. Jika 100% angka popularitas para bakal calon anggota legislatif maka itu artinya peluang bagi para bakal calon anggota legislatif untuk menang semakin mendekat.

Dalam mendongkrak popularitas dapat pula dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini;

1. Para bakal calon anggota legislatif aktif menghadiri setiap undangan warga disekitar tempat tinggal maupun di wilayah dapilnya secara terus menerus.
2. Aktif menghadiri secara sengaja acara-acara sosial diseperti lingkungan seperti kegiatan gotong-royong, rapat-rapat, urusan tempat ibadah, acara kepemudaan, acara keagamaan, acara hajatan, dan acara-acara lainnya dimana membutuhkan kehadiran para bakal calon anggota legislatif secara fisik langsung.
3. Membentuk tim yang bertugas untuk mensupport urusan online maupun offline seluruh kegiatan para bakal calon anggota legislatif yang terkait dengan urusan caleg.
4. Para bakal calon anggota legislatif mengikuti *les-private* yang terkait dengan pengembangan diri. Pelatihan *gesture* atau pelatihan *public-speaking* juga sangat disarankan untuk diikuti secara serius. Poin ini targetnya adalah supaya para bakal calon anggota legislatif memiliki sifat yang dapat menyenangkan orang lain. hal ini sangat perlu. Karena hanya orang yang senang dengan para bakal calon anggota legislatif yang akan memilihnya.
5. Para bakal calon anggota legislatif harus mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk melihat kemampuannya dalam berkomunikasi dengan masyarakat serta kerja nyatanya untuk masyarakat.
6. Para bakal calon anggota legislatif harus memulai bersosialisasi secara lebih teratur, bertutur layaknya seorang wakil rakyat. Harus embuktikan kepada masyarakat bahwa sosok yang mereka ikuti di media sosial adalah sosok yang memang peduli pada rakyat. Namun, hal ini tidak perlu dilakukan secara berlebihan dalam artian bahwa para bakal calon anggota legislatif tidak harus selalu berpakaian jas dan dasi untuk bepergian kemana-mana. Sesuaikan momentumnya.
7. Para bakal calon anggota legislatif memilih sendiri cara apa yang akan digunakan di dapilnya. Sesuai dengan karakter masyarakat serta sesuai dengan adat dan budaya masyarakat.

8. Para bakal calon anggota legislatif juga harus memperbanyak wawasan.

Saat ini, waktu masih sangat panjang untuk menuju pileg tahun 2019. Sehingga para bakal calon anggota legislatif dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mendongkrak popularitasnya masing-masing.

#### **b. Kekurangan**

Media sosial khususnya *Facebook*, selain memiliki segudang manfaat, juga memiliki beberapa kekurangan yang sering menimbulkan permasalahannya yang menjadikannya justru semakin sulit. Adapun kekurangannya antara lain yaitu:

1. Para bakal calon anggota legislatif terutama yang sudah pernah menjabat sebelumnya mendapatkan komentar-komentar yang dapat menjatuhkan popularitasnya.
2. Foto-foto yang diunggah oleh para bakal calon anggota legislatif kadang juga dapat dijadikan bahan olok-olok atau meme yang dapat mempengaruhi pemikiran para pemilih untuk tidak memilihnya lagi.
3. Banyak dari para bakal calon anggota legislatif yang hanya jadi sasaran *bully* akibat ulah *update* statusnya di *Facebook* yang dianggap terlalu menyudutkan lawan politik tertentu, atau dianggap terlalu "*lebay*".
4. Di sisi lain, konten dan opini yang dibangun di media sosial oleh pelaku politik kadang juga dapat berimbas negatif bagi para pesaing politik (mencari kesalahan lawan politiknya).

Uraian di atas menjelaskan bahwa media sosial khususnya *Facebook* memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangannya dalam pemanfaatan untuk meningkatkan popularitas ataupun dukungan dari masyarakat untuk para bakal calon anggota legislatif khususnya periode 2019. Para bakal calon anggota legislatif dapat memanfaatkan media sosial tersebut semaksimal mungkin untuk mendapatkan perhatian serta dukungan kepada para bakal calon anggota legislatif yang maju di dapilnya masing-masing. Melalui media sosial, para bakal calon anggota legislatif tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk berkampanye. Hal ini dikarenakan, para bakal calon anggota legislatif dengan mudah dapat membangun relasi dengan para pemilihnya melalui postingan-postingan yang menarik untuk dibahas dan tentunya terkait isu-isu yang ada di wilayah dapilnya.

## **5. SIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik antara para bakal calon anggota legislatif dengan para pemilihnya dapat dilakukan melalui media sosial. Media sosial sangat bermanfaat jika dapat dimanfaatkan secara efektif dan teratur oleh parapenggunanya. Media sosial yang paling tepat dilakukan untuk komunikasi politik saat ini adalah media *Facebook* hal ini disebabkan karena media *Facebook* merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pemilih atau masyarakat pada umumnya. Hal ini juga sangat efisien jika mampu menarik perhatian para pemilih pemula untuk ikut terlibat dalam proses penentuan siapa wakil rakyat yang mampu membawa semua aspirasi masyarakat kedepannya. Melalui media ini, para pemilih juga akan menjaring sendiri dan mengikut setiap isu-isu yang berkembang di wilayah dapilnya. Disatu sisi, media sosial dapat dijadikan sebagai alat yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam melakukan berbagai macam aktivitas terutama dalam hal memperkenalkan diri dan saling menyapa antara satu dengan yang lainnya. Melalui media sosial, antara masyarakat dan para calon anggota legislatif tidak perlu melakukan pertemuan secara langsung. Namun meskipun demikian, pertemuan langsung juga penting dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk berbuat secara nyata didalam

kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat percaya bahwa sosok yang masyarakat butuhkan hadir bersamanya dan mempercayainya untuk mewakilkan mereka.

Namun meskipun demikian, para calon anggota legislatif tidak boleh hanya mengandalkan media siosial saja untuk mendekati diri dengan para masyarakat yang memilihnya. Hal ini disebabkan karena media sosial memiliki kekurangannya diantaranya yaitu adanya kelakuan masyarakat yang tidak mendukungnya akan membentuk opini-opini yang dapat mempengaruhi masyarakat. Selain itu, foto-foto para calon anggota legislatif juga dapat dijadikan sebagai bahan olok-olok atau meme orang sekelompok orang melalui akun-akun bondong dan menyebarkanluaskannya. Sehingga setiap gerak-gerik yang mencurigakan dapat dipantau secara terus menerus oleh para calon anggota legislatif. Sehingga nama baiknya di mata masyarakat masih tetap dimilikinya.

## 6. REFERENSI

Anwar, Arifin. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan. – Strategi dan Komunikasi Politik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ardial, 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta : Indeks

Biddle, B.J., dan Thomas, E.J., 1966, *Role Theory: Concept and Research*, New. York, Wiley. Kelsen

Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chavez, Jonathan. 2012. *#Fail: The Misuse of Social Media Campaign in the 2012 US Presidential Campaign*. Dapat diakses di [http://www.tcd.ie/policyinstitute/assets/pdf/PL\\_Chavez\\_March12.pdf](http://www.tcd.ie/policyinstitute/assets/pdf/PL_Chavez_March12.pdf), diakses 22 Maret 2018

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam. Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Momoc, Antonio. 2011. “New Media and Social Media in the Political Communication” dalam *The 6<sup>th</sup> Edition of The International Conference European Integration Realities and Perspectives*, hal.556562. <http://www.proceedings.univdanubius.ro/index.php/eirp/article/view/797/725>, diakses 21 Juli 2013

Nie dan Verb, 1975, *Political Participation, Handbook of Political Sciences*. FredI. Greenstein & Nelson W,P. (eds), Addison: Wesley Publishing Company,

Nimmo, Dan, 2000, *Political Communication and Public Opinion and America*, diterbitkan Goodyear Pubhling, edisi Indonesianya, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Bandung; Rosda Karya.

Romli, Khomsahrial. 2014. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Grasindo: Jakarta

Rush, Michael dan Philip Althoff. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

*Sarwono, S. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo*

*Severin, J. Werner & Jr, James W. Tankard. 2011. Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Kelima. Jakarta: Prenada Media*

*Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara*

*Surbakti, Ramlan.1999. Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.*

# MEMBINCANG RELASI GENDER DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI (Studi Kasus Terhadap *Public Speaking* Versus *Private Speaking* di Aceh Barat)

**Muzakkir**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar:  
Email: muzakkir@utu.ac.id

## ***Abstract***

*The study and analysis in this paper based on addressing gender differences is common as long as it does not result in gender inequalities. In general, the notion of gender is a visible difference between men and women when viewed from values and behavior. In the Women Studies Encyclopedia it is explained that Gender is a cultural concept, seeking to make a distinction in terms of the roles, behaviors, mentality, and emotional characteristics of the growing male and female in society. However, reality in society indicates that gender differences give rise to various forms of inequality and injustice. Islam is a religion that strongly emphasizes the importance of respect for human beings and it seems his teaching is very accommodating to human values. One form of elaboration of human values is a sincere recognition of human equality and unity. The women of Rasulullah SAW era are described as active, polite, well-preserved women. In fact, in the Qur'an, the ideal figure of a Muslim is symbolized as a person who has independence in politics, like the figure of Queen Balqis who leads the superpower kingdom (`arsyun` azhim). Communication is the exchange of ideas, information, feelings or thoughts between people (individuals) face to face (face to face), verbal and non verbal. While counseling is a reciprocal relationship between two individuals, where a counselor is trying to help the other (the client) to try to solve the problems he is facing. Relation of gender is a social relationship between men and women who are socially formed and culture in doing everything. Based on the findings, it turns out that the meeting in West Aceh district, who want to appear in politics and to become ruler is still zero percent.*

***Keywords: Gender Relations, Communications, Public Speaking, Private Speaking***

## **1. PENDAHULUAN**

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama rahmatan lil`alamin (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal-hal tertentu. Ukuran kemuliaan seorang hamba dihadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas ketakwaan, tanpa membedakan jenis kelaminnya. (QS. al-Hujarat: 13).

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk menjadi insan bertakwa. Al-Quran tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. semua insan tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi `abid dan khalifah (QS. an-Nisa` : 124 dan al-Nahl: 97).

Dalam kaitan dengan relasi gender banyak dijumpai pemahaman dan penafsiran Islam yang bersifat distortif dan bias gender, misalnya, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.

Dalam masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akal nya pendek, lagi pula halus perasaannya, sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadits yang menyatakan, “Perempuan itu lemah akal dan kurang agamanya”. Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menjelaskan bahwa, ”laki-laki itu pemimpin bagi wanita”. (QS. an-Nisa` : 34).

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan pada umumnya menunjukkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Keadaan seperti ini sudah mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminisme berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Gerakan feminisme dilandasi oleh ketidakseimbangan peran dan fungsi gender dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dapat dianalisis dari adanya kekerasan terhadap perempuan, *stereotype* perempuan terhadap tubuhnya, dan masalah perempuan berkaitan dengan keragaman identitas (kemiskinan dan rasisme).

Perbedaan gender merupakan sebuah masalah yang telah cukup lama berkembang di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat mengandung paham patriarkhi. Mengenai perbedaan status dan kedudukan berdasarkan gender berawal dari dua teori besar yaitu teori *nature* dan *nurture* yang menjelaskan bagaimana terbentuknya kodrat laki-laki perempuan dalam masyarakat. Dalam pandangan teori *nature* dikemukakan bahwa adanya perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrati disebabkan karena faktor genetis biologis. Adapun teori *nurture* beranggapan bahwa terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial budaya. Melihat fenomena ini lahirlah sekelompok orang yang menamakan diri kelompok feminis. Mereka berjuang untuk memperoleh hak yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Hak untuk berkarir, menjadi pemimpin, dan lain-lain.

### **Pengertian dan Sejarah Feminism**

Secara etimologis kata feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu femina yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Kemudian kata itu ditambah "isme" menjadi feminisme, yang berarti hal ihwal tentang perempuan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), feminisme di artikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu teori kesetaraan jenis kelamin (*sexual equality*). Secara historis istilah itu muncul pertama kali pada tahun 1895, sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.

Dalam pengertian yang lebih luas, feminisme sekurang-kurangnya mencakup tiga pengertian pokok. *Pertama*, feminisme merupakan pengalaman hidup, sebab ia tidak terlepas dari sejarah munculnya, yaitu dari masyarakat patriarkhi. Dari sejarah hidup inilah kemudian lahirlah kaum perempuan yang mempunyai kesadaran feminis. *Kedua*, feminisme sebagai alat perjuangan politik bagi kebebasan manusia. Berangkat dari kesadaran feminisme inilah, perempuan ingin melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan yang selama ini dialaminya. Perjuangannya itu diletakkan dalam bentuk persamaan hukum (legal status) hak memilih dan kesetaraan dengan laki-laki. Gerakan tersebut kemudian disebut dengan liberation movement, yakni suatu gerakan pembebasan yang intinya menuntut persamaan dalam struktur sosial politik. *Ketiga*, feminisme sebagai aktivitas intelektual. Artinya gerakan yang memberikan pemahaman tentang kehidupan sosial, di mana perempuan itu tinggal, kekuatan yang dapat dilaksanakan untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan nasib perempuan dan untuk mengetahui apa yang harus diperjuangkan, bagaimana mendefinisikan bentuk-bentuk penindasan atas perempuan dan lain sebagainya.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung dari pada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan. Oleh karena itulah,

kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda.

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama. Pada awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya - terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

### **Gerakan Gender**

Gerakan gender adalah salah satu hasil kreasi gerakan feminisme. Feminisme sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya adalah sebuah kelompok gerakan wanita yang protes terhadap pandangan dan sikap Barat terhadap perempuan. Pandangan Barat terhadap perempuan yang dipengaruhi oleh ajaran gereja menganggap perempuan sebagai penyebab Adam keluar dari surga, dan wanita sebagai sumber dosa. Ajaran-ajaran gereja inilah yang mendorong laki-laki berlaku semena-mena, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, maupun politik, sehingga wanita selalu tertindas. Tidak hanya itu, ketika gereja mendirikan institusi *Inquisisi* untuk menghukum umat kristiani yang menyeleweng dari ajaran gereja, perempuan menjadi korban paling banyak.

Gender merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis dan perbedaan dari segi peran serta sikap. Gerakan gender muncul pada awal 1970-an. Dalam hal ini, Hamid berpendapat bahwa kondisi perempuan dalam tradisi Barat kuno merupakan faktor penting dalam melahirkan wacana dan bahkan teori feminisme dan gender. Untuk itu, ia menyimpulkan bahwa kedua gerakan itu (feminisme dan gender) merupakan konstruk sosial masyarakat Barat *post-modern* yang misi utamanya adalah mengembangkan kesetaraan (*equality*).

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi yang dilakukan pada karya ini dasarnya adalah *literer (library research)*. Sumber data penelitian ini berdasarkan riset kepustakaan, dengan mengandalkan sumber-sumber primer yang terkait dengan pokok-pokok masalah seperti buku-buku komunikasi, jurnalistik, majalah, surat kabar, buletin-buletin. Sedangkan sumber sekunder berupa rujukan-rujukan lain seperti al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan penelitian dimaksud.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, dan multidisipliner. Setelah itu, data yang telah ada, penulis analisis dengan menggunakan metode komparatif dalam paradigam kualitatif. Tujuannya untuk mencari titik persamaan dan perbedaan para pakar komunikasi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam studi ini, juga digunakan metode kualitatif berkaitan erat dengan paradigma interpretatif dapat dilihat dalam beberapa karakteristiknya:

- a. Riset kualitatif berfokus pada kata, bukannya angka. Dalam riset dengan menggunakan metode ini dilakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap relasi gender terhadap suatu keadaan atau kejadian.
- b. Keterlibatan peneliti; instrument utama riset kualitatif adalah peneliti terlibat dekat dengan orang-orang yang diteliti. (Christine Daymon, 2008).

### **Langkah-Langkah Penelitian**

- a. Teknik pengumpulan data
  1. Data primer yaitu melalui riset kepustakaan.
  2. Data sekunder diperoleh bersumber dari al-Quran, hadis dan pendapat ulama, dari buku-buku komunikasi, sosiologi, antropologi, jurnalistik, buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data yang terkumpul dianalisis agar pembahasan tulisan ini lebih objektif dan sempurna.
- b. Teknik Analisa data

Dalam teknik analisa data, penulis mendalami terlebih dahulu informasi/data yang terdapat dari sumber primer dan dari sumber sekunder, yang selanjutnya dianalisis dan diverifikasi untuk disimpulkan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Gender**

Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggungjawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Di masyarakat, laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulin seperti perkasa, berani, rasional, keras, dan tegar. Sebaliknya, perempuan digambarkan dengan sifat feminisme seperti lembut, pemalu, penakut, emosional, rapuh, dan penyayang. (Siti Musdah Mulia :2002)

Muchtar, (2001) menegaskan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

Secara epistemologi penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya August Comte (1798-1857), Herbert Spincer (1820-1930), dan masih banyak para ilmuwan yang lain.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih 1999).

## **Kesetaraan Gender**

Di dalam *Women`s Studies Encyclopedia* dijelaskan, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, kentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Identitas peran gender menjelaskan sejauh mana seseorang menganggap dirinya sebagai feminim dan maskulin sebagaimana ditentukan oleh peran seksualnya. Pengertian feminitas dan maskulinitas bagi setiap orang tidak akan sama. Kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversial. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki seperti kesamaan hak dan kewajiban, konsep mitra sejajar, hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodrat masing-masing.

Kesetaraan gender dapat juga menunjukkan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam segala akses. Laki-laki dan perempuan memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

## **Konco Wingking**

Ketimpangan gender dapat dilihat dari bentuk *subordinasi* yang beranggapan perempuan itu tidak penting melainkan sekedar *konco wingking* (pelengkap dari kepentingan laki-laki). Namun, upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang niscaya mengingat kesadaran masyarakat dunia sudah semakin tinggi dalam perlindungan hak asasi perempuan.

Menurut Handayani dan Novianto, (2004), mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam perkawinan, istilah *konco wingking*, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasangan suami isteri terhadap suku Jawa. Konsep *swarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka pun turut). Istilah tersebut jugamenggambarkan posisi perempuan Jawa yang lemah sebagai seorang istri.

Selain itu bagi masyarakat Jawa, perempuan sejati adalah perempuan yang tetap tampak lembut dan berperan dengan baik di rumah sebagai ibu maupun istri, di dapur maupun di tempat tidur. Masyarakat Jawa berharap perempuannya bersikap dan berperilaku halus, rela menderita, dan setia. Ia diharapkan dapat menerima segala sesuatu bahkan yang terpahit sekalipun. Berkaitan dengan prinsip hormat, sedapat mungkin perempuan Jawa tidak tampil dalam sektor publik karena secara normatif perempuan tidak boleh melebihi suami. Kalaupun kemungkinan untuk tampil tersedia, perempuan Jawa diharapkan tidak menggunakan kesempatan itu jika dapat mengganggu harmoni kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, istri tidak boleh memperlakukan suami. Istri harus selalu menghormati dan menghargai suami, menempatkan suami begitu tinggi, dan memenuhi segala kebutuhan suami.

Namun demikian, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sistem bilateral, dan bukan paternalistik, yang justru tampak dalam praktik hidup sehari-hari pada masyarakat Jawa. Sebagian orang menganggap perempuan Jawa memiliki kekuasaan yang tinggi mengingat sumbangannya yang umumnya cukup besar dalam ekonomi keluarga yang dicapai melalui partisipasi aktif mereka dalam kegiatan produktif (Widyastuti, 2005). Dan fungsi istri sebagai manajer rumah tangga justru membuat posisi kontrol perempuan Jawa menjadi lebih kuat.

Selain itu adanya konsep istri sebagai *sigaraning nyawa*, bukan sekedar *konco wingking* juga memberikan gambaran posisi yang sejajar dan lebih egaliter terhadap perempuan Jawa (Handayani & Novianto, 2004). Istilah *konco wingking* pun tidak selalu lebih rendah, tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya.

Selain itu Handayani dan Novianto juga berpendapat bahwa perempuan Jawa bukannya tidak memiliki otoritas pribadi. Hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya. Oleh karena itu, pengabdian total perempuan Jawa merupakan strategi diplomasi untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Jadi secara struktur formal, mereka terlihat tidak berpengaruh. Namun secara informal, pengaruh mereka sangat besar. Bahkan lama kelamaan suami yang akan tergantung kepada istrinya terutama secara emosional. Pada posisi inilah, perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Sehubungan dengan itu, Indrawati, (2002) berpendapat saat ini memang telah terjadi pergeseran kedudukan dan relasi gender masyarakat Jawa. Menurutnya, modernisasi, emansipasi perempuan, dan masuknya pengaruh budaya barat, telah menggeser pola relasi gender mengarah kepada persamaan derajat dan kedudukan. Sedikit banyak diperkirakan pergeseran pola relasi gender ini dapat pula mempengaruhi kehidupan perkawinan masyarakat Jawa meskipun belum ada penelitian empiris mengenai hal ini. Ketimpangan gender dapat juga mengambil bentuk subordinasi yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting, melainkan sekedar *konco wingking* atau pelengkap dari kepentingan laki-laki. Di masyarakat, masih kuat anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosinya sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin.

### **Anggapan Konco Wingking Hilang**

Anggapan perempuan hanya sebagai '*konco wingking*', kini berangsur menghilang di Kabupaten Batang. Terbukti, kaum perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Kaum perempuan di Kabupaten Batang sudah banyak memiliki peran penting. Di bidang politik saja kini ada 9 perempuan dari 45 anggota dewan. Dan yang menjabat di puncak pimpinan organisasi Perangkat Daerah atau eksekutif ada 6 perempuan dan jabatan itu sangat strategis," kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata.

Dengan fakta tersebut, menunjukkan kaum perempuan kini memiliki kekuatan. Namun yang menjadi ganjalan, sekarang dalam politik, budaya perempuan hanya di bagian belakang atau '*konco wingking*' masih menjadi pedoman di beberapa daerah. "Kami harapkan budaya perempuan sebagai *konco wingking* itu dapat dihilangkan. Karena terbukti perempuan sejajar memiliki hak yang sama dan tempat strategis dalam perpolitikan, maupun sehari-hari," harapnya.

Diungkapkan narasumber lain, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Tazaka KH Anang Rikza Masyhad. Menurutnya kaum perempuan memiliki peran dalam sejarah kemanusiaan, dari posisi di tengah sampai memiliki peran penting. "Peran perempuan dalam sejarah meliputi peran kebaikan, peran kejahatan, peran menjadi orang besar, peran menjadi pendamping orang besar, sampai tentu saja melahirkan orang besar," ucap Anang Riska Mashadi.

Direktur Kajian Pancasila dan Demokrasi Unnes, Arif Hidayat mengatakan, dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat. "Perempuan berpolitik justru sangat bermanfaat, karena bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat,"

### **Gender Dalam Perilaku Sosial Budaya**

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum

tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum adat). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hubungan yang subordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang tertindas. Oleh karenanya kaum feminis berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.

Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidakadilan gender sering terjadi di mana-mana ini berkaitan dengan berbagai faktor. Mulai dari kebutuhan ekonomi budaya dan lain lain. Sebenarnya masalah gender sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, ini merupakan masalah lama yang sulit untuk di selesaikan tanpa ada kesadaran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Budaya yang mengakar di indonesia kalau perempuan hanya melakukan sesuatu yang berkutik didalam rumah membuat ini menjadi kebiasaan yang turun temurun yang sulit dihilangkan. Banyak yang menganggap perbedaan atau diskriminasi gender yang ada pada film itu adalah hal yang biasa dan umum, sehingga mereka tidak merasa di diskriminasi, namun akhir-akhir ini muncul berbagai gerakan untuk melawan bias gender tersebut.

Hal ini nampak yang menggambarkan banyak para kaum lelaki menjadi pemimpin perusahaan. Dan sebaliknya banyak para wanita yang digambarkan sebagai pembantu rumah tangga TKW. Hal yang lebih mengecewakan ialah para wanita tidak merasa ditindas. Subordinasi atau penomorduaan merupakan sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dibangun atas dasar keyakinan satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding yang lain. Ini mempunyai pendapat bahwa lelaki mempunyai lebih unggul. Hal ini berkeyakinan bahwa kalau ada laki laki kenapa harus perempuan.

### **Komunikasi dan Konseling**

Komunikasi adalah pertukaran informasi, perasaan atau pemikiran antar manusia (individu) secara tatap muka (*face to face*), verbal dan non verbal. Karena sifat dari interaksi ini adalah langsung dan segera. Komunikasi merupakan inti dari semua hubungan antar manusia sedangkan proses komunikasi interpersonal adalah suatu proses dua arah lingkaran interaktif dimana pihak –pihak yang berkomunikasi saling bertukar pesan secara verbal dan non verbal (arus pesan).

Kedua pihak menjadi pengirim maupun penerima pesan, dalam proses ini si penerima menafsirkan pesan si pengirim sebelumnya dan memberikan tanggapan dengan pesan yang baru, dengan kata lain komunikasi interpersonal adalah proses tatap muka penyampaian informasi dan saling pengertian antara dua atau lebih individu.

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisi saat ini, masalah yang sedang di hadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Rochman Natawidjaja (1987), konseling adalah sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang.

Konseling adalah proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan dan perasaan-perasaan klien. (Saraswati Taringan, 2002)

Proses konseling menggambarkan adanya kerja sama antara bidan selaku konselor dengan klien dalam mencari tahu tentang masalah yang dihadapi klien dan bidan agar mencapai jalan keluar pemecahan masalah klien. Manfaat konseling adalah meningkatkan kemampuan klien dalam mengenal masalah, merumuskan alternatif, memecahkan masalah dan memiliki pengalaman dalam pemecahan masalah secara mandiri.

### **Partisipasi Perempuan dalam Media**

Persoalan representasi perempuan di media, pemberitaan yang memiliki sensitivitas gender, dan jurnalisme yang memiliki keberpihakan seperti yang terurai di atas pada dasarnya bermula pada sejauh mana akses perempuan pada media massa. Konferensi tingkat dunia tentang perempuan ke-IV di Beijing, China pada tahun 1995 berhasil merumuskan rekomendasi 12 bidang kritis sebagai sasaran-sasaran strategis yang harus dipenuhi Negara. Isi dari rekomendasi yang disebut dengan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (Beijing Platform for Action) itu antara lain adalah mencapai sasaran strategis bagi perempuan di media massa. Ada dua sasaran strategis menyangkut perempuan dan media massayaitu :

- Meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru
- Memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media.

Perempuan dan media massa menjadi salah satu bidang sasaran strategis. Hal itu dikarenakan pada kenyataannya identitas dan representasi perempuan di media massa masih menunjukkan kuatnya *stereotype* terhadap perempuan akibat budaya patriarkhal selain juga perempuan sebagai obyek di media massa. Di sisi lain, media massa memang memiliki peranan yang besar dalam mengkonstruksi masyarakat sehingga gambaran tentang perempuan yang muncul di media jika tidak dikritisi akan dianggap natural, wajar, dan bahkan begitulah adanya. Padahal, jika saja akses perempuan terhadap media tidak terbatas, banyak yang bisa dilakukan oleh mereka yang kritis terhadap identitas dan representasi perempuan dalam media. Keterbatasan akses itu membuat perempuan menjadi terpinggirkan. Wajah perempuan yang sesungguhnya tidak tampak dan suara perempuan tidak terdengar karena terhegemoni oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang berbalut nilai-nilai patriarkhal.

Sebuah organisasi non-pemerintah mengidentifikasi hambatan-hambatan perempuan dalam media massa. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut (Achmad, 2005). *Pertama*, citra perempuan yang tampil dalam iklan-iklan masih seputar kegiatan domestik dan kecantikan. *Kedua*, program acara televisi juga memberi kontribusi negatif terhadap citra perempuan. Perempuan jarang digambarkan sebagai sosok yang independen, berani dan terpelajar dalam sinetron-sinetron televisi. *Ketiga*, hanya sedikit program acara TV dan radio yang memberdayakan perempuan. Kalaupun perempuan tampil dalam program acara TV dan radio, lebih mengarah pada kegiatan masak-memasak atau personal grooming. *Keempat*, media memperlakukan perempuan lebih sebagai obyek yang dieksploitasi, sehingga tubuh perempuan tampil dalam iklan-iklan yang tidak ada hubungannya dengan produk yang diiklankan. Begitu

juga pemberitaan-pemberitaan yang tidak sensitif terhadap gender. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan yang besar dalam hal pemahaman dan kesadaran gender. *Kelima*, bahasa pun kemudian mengkonstruksi *stereotype* citra perempuan di media. Yang terjadi kemudian adalah kerja jurnalistik, melalui bahasa dan pilihan katanya, menampilkan berita-berita kriminalitas yang membuat perempuan menjadi korban berkali-kali dan bukannya memberitakan adanya pelanggaran hak terhadap perempuan. *Keenam*, tidak adanya program khusus dari pemerintah untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep-konsep kesetaraan dan keadilan gender di media massa. *Ketujuh*, pemerintah masih belum bisa merevisi sumber hukum yang sangat bias gender yaitu UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Isi undang-undang itu sangat bertentangan dengan CEDAW (*Convention on the Eliminating of All Forms of Discriminating Against Women*), gerakan perempuan ini telah mendapat “restu” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan sebuah konvensi internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. *Kedelapan*, perempuan tidak bisa menggunakan pengaruhnya dalam menentukan isi media dan kebijakan-kebijakannya dikarenakan hanya sedikit perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan di media.

Berangkat dari argumentasi-argumentasi di ataslah kemudian menjadi sangat bisa diterima jika perempuan perlu memanfaatkan media massa untuk memperdengarkan suara dan pengalamannya dan sekaligus menampilkan wajah perempuan yang lebih representatif. Dalam tulisannya, Adriana Venny (2005) mengatakan bahwa sejalan dengan perannya sebagai media sumber informasi, pendidikan, dan hiburan, media massa juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ia mencontohkan keberhasilan program pemerintah masa Orde Baru yang membentuk “Kelompencapir” (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) ketika mensosialisasikan program-program pertaniannya.

Organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop-ornop) yang memperjuangkan hak perempuan menyadari bahwa mereka harus memiliki media sendiri untuk menyebarkan gagasan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Media juga mereka perlukan untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan dan menggalang kesatuan untuk melakukan perubahan. Adriana Venny mencatatkan beberapa ornop perempuan yang memiliki media sendiri untuk tujuan-tujuan meningkatkan partisipasi dan akses perempuan melalui media dan teknologi komunikasi. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) menggunakan media cetak berupa jurnal, website, dan radio dengan memproduksi program acara radio yang memuat isu-isu perempuan dan disiarkan oleh 167 stasiun radio. Selain itu YJP juga membuat film dokumenter tentang perempuan di wilayah konflik dan perdagangan perempuan. Selain itu, banyak ornop-ornop perempuan yang memiliki dan menggunakan media newsletter sendiri untuk menyebarkan kesadaran dan isu-isu gender.

Meski ornop-ornop perempuan itu telah begitu baik memanfaatkan industri media untuk menjalankan peran mereka, Venny memberikan catatan pula bahwa nyaris tidak ada dukungan dari pemerintah, industri iklan dan para pembuat kebijakan dalam industri media atas apa yang mereka lakukan. Tidak heran jika upaya gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender masih memiliki kendala hingga kini. Karenanya, diperlukan sebuah media alternatif yang luas jangkauannya dan mampu membawa pada perubahan.

### **Relasi Gender Dalam Komunikasi**

Robin Lakoff (dalam Griffin, 2003) mencoba mengklasifikasikan keberaturan pembicaraan perempuan, dan membedakan antara *woman talk* dari *man talk*. Robin mengklaim bahwa percakapan perempuan mempunyai karakter sebagai berikut:

- a. Ditandai apologis.
- b. Pernyataan tidak langsung.
- c. Pertanyaan yang minta persetujuan
- d. Mengkualifikasikan.

- e. Perintah yang sopan.
- f. Menggunakan istilah *color*.
- g. Cenderung menghindari bahasa vulgar.
- h. Sedikit berbicara, banyak mendengarkan.

Berdasarkan penelitian Griffin (2003) pada refleksi personal, menemukan tiga pola perbedaan antara perempuan dan laki-laki, *pertama*; lebih banyak persamaan antara laki-laki dan perempuan dari pada perbedaannya. *Kedua*; variabilitas yang besar berkenaan gaya komunikasi antara laki dan perempuan. *Ketiga*; sex adalah fakta, gender sebagai gagasan. Dalam kaitan gender dan komunikasi, Griffin menyadur tiga pemikiran sebagai berikut: *Genderlect Styles*, *Standpoint Theory* dan *Muted Group Theory*.

### **Genderlect Styles**

*Genderlect Styles* yaitu mendiskripsikan ketidakmengertian antaralaki-laki dan perempuan berkenaan dengan fakta bahwa fokus pembicaraan perempuan adalah koneksitas, sementara laki-laki pada pelayanan status dan kemandiriannya. *Genderlect Styles* membicarakan gaya bercakap-cakap, bukan apa yang dikatakan tetapi bagaimana menyatakannya. Prinsip ini meyakini bahwa terdapat gap antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas budaya (*cross culture*). Untuk itu perlu mengantisipasi berkenaan dengan gap itu. Kegagalan mengamati perbedaan gaya bercakap dapat membawa masalah yang besar, perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status. Koneksi berhubungan erat dengan kedekatan, status berhubungan erat dengan kekuasaan (*power*).

*Raport talk* adalah untuk menilai obrolan perempuan yang cenderung terkesan simpatik. *Report talk* adalah digunakan menilai obrolan laki-laki yang cenderung apa adanya. Berkenaan dengan kedua nilai ini, penulis melakukan:

### **Ciri-Ciri Perbedaan Perempuan dan Laki-laki dalam Proses Komunikasi**

Griffin (2003) membagi kepada lima ciri berbeda antara laki-laki dan perempuan (gender) dalam melakukan kontak sosial (proses komunikasi):

1. **Publik speaking versus private speaking**, dalam kategori ini ditemukan bahwa perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi. Sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat pembicaraan publik, laki-laki menggunakan pembicaraan sebagai pernyataan fungsi perintah; menyampaikan informasi; meminta persetujuan.
2. **Telling story**, cerita-cerita menggambarkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai si pencerita. Pada kategori ini laki-laki lebih banyak bercerita dibanding perempuan-khususnya tentang guyonan. Cerita guyonan merupakan suatu cara maskulin menegosiasi status (memperoleh kekuasaan).
3. **Listening**, perempuan cenderung menjaga pandangan, sering manggut, pertanda ia mendengarkan dan menyatakan kebersamaannya. Laki-laki dalam hal ini mendengarkan berusaha mengaburkan kesan itu- sebagai upaya menjaga statusnya.
4. **Asking questions**, ketika ingin bicara untuk menyela pembicara, perempuan terlebih dahulu mengungkapkan persetujuan. Berbeda pada laki-laki, interupsi dipandang sebagai power-kekuasaan untuk mengendalikan pembicaraan. Dengan kata lain, pertanyaan dipakai oleh perempuan untuk memantapkan hubungan, juga untuk memperhalus ketidaksetujuan dengan pembicara, sedangkan laki-laki memakai kesempatan bertanya sebagai upaya untuk menjadikan pembicara jadi lemah.
5. **Conflict**, perempuan memandang konflik sebagai ancaman dan perlu dihindari. Laki-laki biasanya memulai konflik namun kurang suka memeliharanya.

## **Kiprah Laki-laki dan Perempuan di Aceh Barat** **Temuan *Public Speaking* Versus *Private Speaking* Gender dalam Proses Komunikasi**

Berdasarkan ciri-ciri perbedaan perempuan dan laki-laki dalam proses komunikasi dapat diamati dan diteliti terhadap public speaking versus private speaking laki-laki dan perempuan (gender) yang berkembang di masyarakat dalam kontak sosial (proses komunikasi). Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan dewasa dalam Kabupaten Aceh Barat, dari sampel 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, ternyata perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi, artinya tidak terungkap dari pribadi perempuan tersebut untuk berkiprah dalam masyarakat, baik dalam urusan politik maupun dalam hal menjadi motivator pembangunan. Sementara pengakuan laki-laki dari jumlah 25 orang yang diwawancarai, ternyata sebagian diantara mereka (laki-laki) lebih banyak terlibat pembicaraan publik.

Artinya, laki-laki lebih condong keinginannya untuk berkiprah dalam masyarakat, keinginan terlibat dalam kancah politik dan ingin menjadi penguasa ternyata memiliki keinginan yang besar. "Kami sebenarnya ingin juga menjadi anggota dewan dan ingin maju menjadi calon bupati, tetapi karena faktor ekonomi, sehingga membuat kami tidak bersemangat untuk maju dalam Pilkada", begitu pengakuan dari sejumlah laki-laki dewasa dalam Kabupaten Aceh Barat. Laki-laki dan perempuan yang menjadi sampel dalam kasus public speaking versus private speaking, dijumpai di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Meureubo, Pante Ceureumen, dan Woyla, Kabupaten Aceh Barat.

Bukti konkret lainnya, ketika dibuka kesempatan menjadi calon pemimpin publik di Kabupaten Aceh Barat, tahun 2006, menunjukkan adanya 11 pasangan calon (paslon) sebagai kandidat Bupati dan calon Wakil Bupati. Dari 11 pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, hanya satu orang perempuan yang tampil sebagai Calon Wakil Bupati yaitu Rosni Idham berpasangan dengan Suwanto (sebagai kandidat bupati), yang maju sebagai calon melalui jalur independen.

Demikian halnya di Tahun 2011-2012, muncul 13 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, berdasarkan penetapan KIP setempat. Dari 13 paslon tersebut, ternyata semuanya adalah laki-laki. Bahkan Tahun 2016-2017, hanya ada 3 paslon yang ditetapkan. Dari 3 paslon juga semuanya laki-laki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa eksistensi perempuan terjun dalam dunia politik masih nol persen.

Pada posisi lain di lembaga politik, menurut keterangan Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat, Bahagia Idris, SH.,MH, keberadaan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Barat, periode 2009-2014, DPRK Aceh Barat yang jumlah anggota dewan sebanyak 30 kursi, hanya ditempati oleh satu orang perempuan yaitu Nurhayati dari Partai Aceh (PA). Demikian juga porsi DPRK Aceh Barat periode 2014-2019, jumlah perempuan bertambah menjadi dua orang yaitu Nurhayati (Partai PA) dan Erliana dari Partai Demokrat (Partai PD).

### ***Standpoint Theory***

*Standpoint Theory* adalah laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang setara. Lokasi-lokasi yang berbeda dalam hirarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Mereka beranggapan bahwa perempuan dan minoritas yang lainnya mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa.

Dasar filosofi teori ini adalah perjuangan kelas, seperti filsafat kaum proletar karya Karl Marx dan Friederich Engels, yang menganjurkan harus ada perjuangan terhadap diskriminasi gender. Mereka tidak mencirikan perbedaan *gender* pada insting atau biologis atau intuisi, tetapi perbedaan itu sebagai hasil harapan-harapan budaya dan perlakuan kelompok dalam hal menerima kelompok yang lain. Budaya tidak dialami secara identik, budaya adalah aturan hirarki sehingga kelompok yang punya posisi cenderung menawarkan kekuasaan, kesempatan pada anggota-anggotanya. Dalam hal ini teori ini menyatakan bahwa perempuan terposisikan

pada hirarki yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi dimana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, simbolis.

### ***Muted Group Theory***

Berdasarkan analisis feminis, yang dikutip Griffin, memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara mereka yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Ia meyakini bahwa perempuan kurang bisa mengartikulasikan diri/memperjuangkan diri dibanding laki-laki di *sector public*- sebab kata dalam bahasa dan norma-norma yang mereka gunakan itu telah dikendalikan laki-laki. Sepanjang pembicaraan perempuan sebagai tentatif dan sepele, posisi dominan laki-laki aman. Menurut Cheri Kramarae yang dikutip Griffin yakin bahwa kebisuhan perempuan itu cenderung menipis, kontrol mereka dalam kehidupan kita akan meningkat.

Cheri Kramarae dalam (Sendjaja:1994) mengemukakan asumsi-asumsi dasar dari teori ini sebagai berikut:

- Perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian kerja.
- Karena dominasi politiknya, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif perempuan.
- Untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah perspektif mereka ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki.

Cheri Kramarae mengemukakan sejumlah hipotesis mengenai komunikasi perempuan berdasarkan beberapa temuan penelitian.

*Pertama*; Perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibanding laki-laki. *Kedua*; Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. *Ketiga*; Perempuan telah menciptakan cara-cara ekspresinya sendiri di luar sistem laki-laki yang dominan. *Keempat*; Perempuan cenderung untuk mengekspresikan lebih banyak ketidakpuasan tentang komunikasi dibanding laki-laki. *Kelima*; Perempuan seringkali berusaha untuk mengubah aturan-aturan komunikasi yang dominan dalam rangka menghindari atau menentang aturan-aturan konvensional. *Keenam*; Secara tradisional perempuan kurang menghasilkan kata-kata baru yang populer dalam masyarakat luas; konsekuensinya, mereka merasa tidak dianggap memiliki kontribusi terhadap bahasa. *Ketujuh*; Perempuan memiliki konsepsi humoris yang berbeda dari pada laki-laki.

## **4. SIMPULAN**

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk menjadi insan bertakwa. Al-Quran tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. semua insan tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi `abid dan khalifah (QS. an-Nisa` : 124 dan al-Nahl: 97). Perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Kesetaraan gender dapat juga menunjukkan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. *Konco*

*wingking*, kini berangsur menghilang di Kabupaten Batang. Terbukti, kaum perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Kaum perempuan di Kabupaten Batang sudah banyak memiliki peran penting. Di bidang politik saja kini ada 9 perempuan dari 45 anggota dewan. Dan yang menjabat di puncak pimpinan organisasi Perangkat Daerah atau eksekutif ada 6 perempuan dan jabatan itu sangat strategis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan dewasa dalam Kabupaten Aceh Barat, dari sampel 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, ternyata perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi, artinya tidak terungkap dari pribadi perempuan tersebut berdasarkan hasil wawancara untuk berkiprah dalam masyarakat, baik dalam urusan politik maupun dalam hal menjadi motivator pembangunan. Sementara pengakuan laki-laki dari jumlah 25 orang yang diwawancarai, ternyata sebagian diantara mereka (laki-laki) lebih banyak terlibat pembicaraan publik. Artinya, laki-laki lebih condong keinginannya untuk berkiprah dalam masyarakat, keinginan terlibat dalam kancah politik dan ingin menjadi penguasa ternyata memiliki keinginan yang besar. "Kami sebenarnya ingin juga menjadi anggota dewan dan ingin maju menjadi calon bupati, tetapi karena faktor ekonomi, sehingga membuat kami tidak bersemangat untuk maju dalam Pilkada", begitu pengakuan dari sejumlah laki-laki dewasa dalam Kabupaten Aceh Barat.

## 5. REFERENSI

- Amiruddin, Mariana, (Ed). 2004. *"Mendengarkan perempuan"*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Andy, Yetriani, dan Lisa Bona (Ed.), 1999. *"Diskusi radio jurnal perempuan: suara demokrasi, budaya, dan hak-hak perempuan"*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2006.
- Irigaray, Luce. 2005, *"Aku, kamu, kita: belajar berbeda"*. Jakarta: Gramedia,.
- Jurnal Perempuan, 2003. *"Perempuan dan media"*, No. 28, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Kusumaningrum, Ade. 2003. *"Radio, media alternatif suara perempuan?"*, Dalam Jurnal perempuan. No. 28. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Leclerc, Annie. 2000. *"Kalau perempuan angkat bicara"*. Yogyakarta : Kanisius.
- Santi, Budie, (Ed). 2003. *"Perempuan bertutur: Sebuah Wacana Keadilan Gender dalam Radio Jurnal Perempuan"*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Universitas Paramadina. 2006. *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid, Cet. 1*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.